



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu. Telp : (0451) 456885, 411289, 428503

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Perubahan Renja (Rencana Kerja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025 Perubahan Renja 2025 ini mengacu pada Perubahan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan industri dan perdagangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perubahan Renja Tahun 2025 diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan baik, sesuai harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian perubahan Renja ini disusun, diharapkan penyelenggaraan rencana kegiatan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Palu,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2025	4
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	65
2.2.1 Bidang Industri	65
2.2.2 Bidang Perdagangan	66
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	67
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	101
3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian	101
3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan	101
3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun2025.....	102
3.3 Program dan Kegiatan	107
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2025	
4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	122
BAB V PENUTUP	
4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	123
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	123
4.3 Rencana tindak lanjut	123

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020	4
Tabel 2.2 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021	68
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	103
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	105
Tabel 3.3 Pagu anggaran Perubahan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	107
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024	111
Tabel 4.1 Usulan Program/Kegiatan Kabupaten / Kota Tahun 2024	123

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Strategis Renstra Perindustrian dan Perdagangan periode Tahun 2021 – 2026, dari segi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pagu anggaran. Untuk Nomenklatur program kegiatan, seluruhnya mengacu pada RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142. Tanggal Penetapan Perda 30 Desember 2022
13. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 Nomor 864. Tanggal Penetapan Pergub 30 Desember 2022
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
1. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021- 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 1 tahun sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renja perubahan ini adalah menjabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dan menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun ini sampai dengan tw.II dan capaian renstra perangkat daerah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025 (Pagu Awal)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025 (Perubahan)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan ke -				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025 (%)	
									I		II					
1	2	4	5		8		8a		9		9a		10 = 9 + 9a		11=10/8a *100%	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K*	Rp	K	Rp	K	Rp
		Urusan Perdagangan	Koefisien Variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	Persen	7.2	1,570,790,550	7.2	1,350,978,700	3.60	40,900,000	4.10	231,528,908	4.10	272,428,908	56.94	20.17
		Urusan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor	Persentase	7.07	534,394,450	7.07	1,699,300,121	4.90	0		828,291,260	4.90	828,291,260	69.31	48.74

			Perdagangan													
		Urusan	Perdagangan	Nilai EksporN Bersih	Juta USD	119 907,480	119 645,406	2,4 0	2,4 05	69,361, 820	4,87 0.59	69,361,820	40.7 6	10. 75		
		Urusan	Perindustrian	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Perse n	41.4 6,454,6 76,988	41.4 6,303,0 06,431	40. 0	40. 19	187,08 8,347	40.1 9	187,088,34 7	96.9 6	2.9 7		
	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	Pro g.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Inde ks	68 19,938, 474,357	68 18,686, 559,236	3,274,0 80,743	4,147,7 02,344	0.00	7,421,783,0 87	0.00	39. 72			
		Keg .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	Inde ks	BB 780,179 ,900	BB 449,351 ,700	0 0	0 0	16,425, 420	0.00	16,425,420	#VA LU E!	3.6 6		
		Sub Keg .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	1 604,933 ,550	1 345,845 ,850	0 0	0 0	11,197, 320	0.00	11,197,320	0.00	3.2 4		
		Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Doku men	1 10,824, 750	1 10,824, 750	0 0	0 0	0 0.00	-	0.00	0.0 0			

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1	6,050,0 00	1	6,050,0 00	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0.0 0	
Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1	6,150,0 00	1	7,709,9 50	0	0	1	5,228,1 00	1.00	5,228,100	100. 00	67. 81	
Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	1	5,976,5 50	1	5,976,5 50	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0.0 0	

Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Ikhtisar Kinerja Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapo ran	1	146,245 ,050	1	72,944, 600	0	0	0	0	0.00	-	0.00	0.0 0
Keg .	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	90	16,749, 050,447	90	16,693, 647,781	9.6 4	3,268,3 80,743. 00	15. 98	3,811,7 92,251. 00	25.6 2	7,080,172,9 94	28.4 6	42. 41
Sub Keg .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/ Bula n	130	15,134, 383,497	130	15,135, 256,481	130	2,948,9 10,743	130	3,460,7 75,291	130. 00	6,409,686,0 34	100. 00	42. 35

Sub Keg .	Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	972,600 ,000	1	1,014,0 00,000	0	251,10 0,000	0	175,03 2,000	0.00	426,132,00 0	0.00	42. 02
Sub Keg .	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Doku men	500	371,490 ,000	500	335,534 ,050	125	68,370, 000	125	78,239, 370	250. 00	146,609,37 0	50.0 0	43. 69
Sub Keg .	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Doku men	12	139,715 ,950	12	118,787 ,850	3	0	3	39,793, 500	6.00	39,793,500	50.0 0	33. 50
Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapo ran	15	46,700, 000	1	46,226, 400	0	0	1	46,222, 770	1.00	46,222,770	100. 00	99. 99

Sub Keg .	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men	5	41,747, 000	2	15,961, 000	0	0	1	10,104, 320	1.00	10,104,320	50.0 0	63. 31
Sub Keg .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lapo ran	14	26,014, 000	14	12,182, 000	4	0	3	1,625,0 00	7.00	1,625,000	50.0 0	13. 34
Sub Keg .	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	1	16,400, 000	1	15,700, 000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Keg .	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	lapo ran	14	176,472 ,000	4	134,416 ,000	1	5,700,0 00	1	6,140,0 00	2.00	11,840,000	50.0 0	8.8 1

		Sub Keg .	Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	10	70,000, 000	1	70,000, 000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Sub Keg .	Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	1	48,700, 000	1	24,405, 000	0	0	0	440,00 0	0.00	440,000	0.00	1.8 0
		Sub Keg .	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	2	30,100, 000	2	15,050, 000	1	0	0	0	1.00	0	50.0 0	0.0 0
		Sub Keg .	Penatausaha n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha n Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	1	27,672, 000	1	24,961, 000	0	5,700,0 00	0	5,700,0 00	0.00	11,400,000	0.00	45. 67
		Keg .	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/sto keholder)	Inde ks Kepu asan Masy arak at	A	170,271 ,100	A	126,959 ,300	0	0	0	0	0.00	0	#VA LU E!	0.0 0

		Sub Keg .	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
		Sub Keg .	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	7,700,000	4	5,350,000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
		Sub Keg .	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	105,240,000	18	94,160,000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
		Sub Keg .	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	43	57,331,100	30	27,449,300	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
		Keg .	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian	Doku men	1	394,209 ,290	1	201,081 ,035	0	0	0	46,549, 313	0.00	46,549,313	0.00	23. 15

	Sub Keg .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,060, 830	4	5,029,8 00	1	0	1	3,464,6 43	2.00	3,464,643	50.0 0	68. 88
	Sub Keg .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	123,492, ,210	4	51,933, 660	0	0	1	22,314, 670	1.00	22,314,670	25.0 0	42. 97
	Sub Keg .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	39,381, 400	4	19,817, 575	0	0	1	3,750,0 00	1.00	3,750,000	25.0 0	18. 92
	Sub Keg .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	12	33,600, 000	12	33,600, 000	3	0	3	10,600, 000	6.00	10,600,000	50.0 0	31. 55
	Sub Keg .	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	77	187,674, ,850	7	90,700, 000	0	0	0	6,420,0 00	0.00	6,420,000	0.00	7.0 8

		Keg .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	1	506,422,300	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	#D IV/0!
		Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	367,180,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	#DI V/0!
		Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Sub Keg .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	39,699,600	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	#DI V/0!
		Sub Keg .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	99,542,700	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	#DI V/0!
		Sub Keg .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

		Sub Keg .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
		Keg .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	laporan	1	533,856 ,820	1	539,516 ,820	0	0	0	114,04 8,082	0.00	114,048,08 2	0.00	21. 14
		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	13	300,000	13	300,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	12	381,895 ,200	12	390,055 ,200	0	0	6	113,74 8,082	6.00	113,748,08 2	50.0 0	29. 16
		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	

		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	4	151,661 ,620	4	149,161 ,620	0	0	1	300,00 0	1.00	300,000	25.0 0	0.2 0
		Keg .	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	lapo ran	1	628,012 ,500	1	541,586 ,600	0	0	0	152,74 7,278	0.00	152,747,27 8	0.00	28. 20
		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	35	428,182 ,500	48	370,846 ,600	16	0	8	112,67 6,278	24.0 0	112,676,27 8	50.0 0	30. 38
		Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

		atau Lapangan	Perizinannya													
	Sub Keg .	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
	Sub Keg .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	139,830,000	109	120,740,000	0	0	46	40,071,000	46.00	40,071,000	42.20	33.19
	Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
	Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	60,000,000	1	50,000,000	1	0	1	0	2.00	0	200.00	0.00
	Pro g.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C	%	100	78,766,650	100	41,137,250	25	0	25	0	50.00	0	50.00	0.00

			Persentase penerbitan SKA	%	100	236,290,850	100	115,382,000	25	0	25	0	50.00	0	50.00	0.00
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

		Sub Keg .	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Doku men	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
		Keg .	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	Doku men	1	78,766, 650	1	41,137, 250	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

		Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi														
Sub Keg .	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Doku men	1	78,766,650	1	41,137,250	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Keg .	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Doku men	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

		Sub Keg .	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	0.0 0
		Sub Keg .	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	0.0 0

		Keg .	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	Laporan	1	236,290,850	1	115,382,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1	236,290,850	1	115,382,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	%	100	191,038,800	100	96,664,400	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

		Keg .	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dokumen	1	191,038,800	1	96,664,400	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Sub Keg .	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	76,548,850	1	41,102,900	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Sub Keg .	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	2	71,933,000	2	35,779,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		Sub Keg .	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan	1	42,556,950	1	19,782,500	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

		kabupaten/kota dalam provinsi														
	Pro g.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	%	100	1,570,790,550	100	1,350,978,700	25	40,900,000	25	231,528,908	0.00	272,428,908	0.00	20.17
	Keg .	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	110,756,950	1	56,075,200	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor	Laporan	4	69,101,250	4	35,756,750	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

			dan Sub Distributor													
Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan	4	41,655,700	4	20,318,450	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Keg .	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten /Kota yang Terintegras	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	Dokumen	1	1,395,862,850	1	1,259,871,000	0	40,900,000	0	231,528,908	0.00	272,428,908	0.00	21.62	

		i dalam Sistem Informasi Perdagangan														
	Sub Keg .	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	4	171,032,900	4	150,845,650		0	1	30,420,000	1.00	30,420,000	25.00	20.17
	Sub Keg .	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang	Laporan	6	1,224,829,950	9	1,109,025,350	2	40,900,000	2	201,108,908	4.00	242,008,908	44.44	21.82

		Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
	Keg .	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	%	100	64,170,750	100	35,032,500	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Sub Keg .	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	#DI V/0! !

		Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Lapo ran	1	64,170, 750	1	35,032, 500	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Pro g.	Pengemb an Ekspor	Nilai ekspor	Juta USD	26,4 78.5 9	671,189 ,600	26,4 78.5 9	530,024 ,550	5,0 96. 11	0	5,3 31. 60	69,361, 820	10,4 27.7 1	69,361,820	39.3 8	13. 09
		Keg .	Penyeleng garan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyeleng garan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota dalam Provinsi	Lapo ran	1	671,189 ,600	1	530,024 ,550		0		69,361, 820	0.00	69,361,820	0.00	13. 09
		Sub Keg .	Pameran Dagang Internasiona l/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	Pelaku Usaha	6	217,456 ,000	6	186,341 ,000		0		27,330, 820	0.00	27,330,820	0.00	14. 67

			dalam Pameran Dagang													
Sub Keg .	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	30	276,548,550	30	250,223,400	0	0	3	42,031,000	3.00	42,031,000	10.00	16.80	
Sub Keg .	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	2	177,185,050	2	93,460,150		0		0	0.00	0	0.00	0.00	
Sub Keg .	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	0	0	0	0		0		0	0.00	0	0.00	0.00	
Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	%	20	255,899,000	20	124,833,300	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	
Keg .	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Laporan	1	107,037,250	1	52,267,600	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	

		Sub Keg .	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMK M	3	107,037 ,250	3	52,267, 600	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Keg .	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Lapo ran	1	108,299 ,750	1	53,130, 900	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Sub Keg .	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	UMK M	25	108,299 ,750	25	53,130, 900	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

		perhotelan dan jasa akomodasi														
	Keg .	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	40,562,000	1	19,434,800	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Sub Keg .	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	40,562,000	1	19,434,800	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Pro g.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	6,086,471,100	100	5,488,677,700	0	0	61	165,476,107	61.46	165,476,107	61.46	3.01

Keg .	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	1	6,086,471,100	1	5,488,677,700	0	0	0	165,476,107	0.00	165,476,107	0.00	3.01
Sub Keg .	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	284,134,450	1	187,475,450	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	44,524,050	1	21,262,200	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	Dokumen	2	632,281,300	2	374,213,100	0	0	0	12,200,000	0.00	12,200,000	0.00	3.26

		Daya Industri													
Sub Keg .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	159,508,700	1	97,649,550	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	4,781,967,550	1	4,718,608,400	0	0	0	153,276,107	0.00	153,276,107	0.00	3.25
Sub Keg .	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	184,055,050	1	89,469,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Pro g.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	%	100	277,999,750	100	133,911,250	0	0	0	8,180,000	0.00	8,180,000	0.00	6.11

	Keg .	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	laporan	1	277,999,750	1	133,911,250	0	0	0	8,180,000	0.00	8,180,000	0.00	6.11
	Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas	Dokumen	1	107,910,600	1	52,973,000	0	0	0	8,180,000	0.00	8,180,000	0.00	15.44

	Sub Keg	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	Doku men	1	170,089,150	1	80,938,250	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
--	------------	--	--	-------------	---	-------------	---	------------	---	---	---	---	------	---	------	------

		pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kot a, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.													
Pro g.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	89	90,206,138	89	44,257,735	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

	Keg .	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	90,206,138	1	44,257,735	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Sub Keg .	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	29,143,300	1	13,732,950	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

	Sub Keg	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Doku men	1	28,927, 838	1	14,467, 135	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Doku men	1	32,135, 000	1	16,057, 650	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)						29,397, 126,795		26,612, 426,121		3,314,9 80,743		4,622,2 49,179	0.00	7,937,229,9 22	#DI V/0!	29. 83

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan ke -	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi
----	---------	--	---	---	---	---	---	--

1	2	4	5		8		8		9		10		11 = 9 + 10		12=11/8* 100%		Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025 (%)	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Mewujudkan tata kelola keperintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	Pro g.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	68	7,193,857,805	68	7,085,863,337		70,770,000		179,368,739	0.00	250,138,739	0.00	3.53	

		Keg .	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	284,430 ,000	90	284,430 ,000	0.9 4	70,770, 000	2.7 0	54,694, 000	3.65	125,464,00 0	4.05	44. 11
		Sub Keg .	Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	284,430 ,000	1	284,430 ,000	0	70,770, 000	0	54,694, 000	0.00	125,464,00 0	0.00	44. 11
		Keg .	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	lapor an	0	0	0	0		0		0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Sub Keg .	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Sub Keg .	Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
		Keg .	Administra si Kepegawai an Perangkat	Jumlah laporan ketatausahaa n dan kepegawaian	lapor an	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

Daerah															
Sub Keg .	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0	0
Keg .	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian	Doku men	1	172,926 ,281	1	81,923, 113	0	0	0	20,470, 050	0.00	20,470,050	0.00	24. 99
Sub Keg .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,237,2 46	1	1,615,1 73	0	0	0	1,615,1 00	0.00	1,615,100	0.00	100 .00
Sub Keg .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	49,011, 735	1	19,830, 590		0		11,367, 750	0.00	11,367,750	0.00	57. 32
Sub Keg .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0	0

Sub Keg .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	31,310, 300	1	16,086, 350	0	0	0	4,562,2 00	0.00	4,562,200	0.00	28. 36
Sub Keg .	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	1	89,367, 000	1	44,391, 000	0	0	0	2,925,0 00	0.00	2,925,000	0.00	6.5 9
Keg .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lapo ran	1	6,399,9 41,876	1	6,399,9 41,876	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	6,399,9 41,876	25	6,399,9 41,876	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Keg .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	lapor an	1	234,109 ,648	1	233,718 ,348	0	0	0	76,694, 796	0.00	76,694,796	0.00	32. 82

Sub Keg .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	1	15,498, 000	1	12,688, 000	0	0	0	1,200,0 00	0.00	1,200,000	0.00	9.4 6
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	1	168,737 ,496	1	171,174 ,696	0	0	0	75,494, 796	0.00	75,494,796	0.00	44. 10
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	1	49,874, 152	1	49,855, 652	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Keg .	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	lapor an	1	102,450 ,000	1	85,850, 000	0	0	0	27,509, 893	0.00	27,509,893	0.00	32. 04

Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4,050,0 00	4	4,050,0 00	1	0	1	131,89 3	2.00	131,893	50.0 0	3.2 6
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	48,600, 000	4	40,040, 000	1	0	1	18,353, 000	2.00	18,353,000	50.0 0	45. 84
Sub Keg .	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	49,800, 000	52	41,760, 000	7	0	8	9,025,0 00	15.0 0	9,025,000	28.8 5	21. 61
Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

			Dipelihara/Dir ehabilitasi													
		Sub Keg .	Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0	0
		Pro g.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	3	529,227 ,358	3	406,395 ,471	2.6	0	-15	23,121, 260	- 12.4 0	23,121,260	- 413. 33	5.6 9
		Keg .	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten /Kota	Indeks	77	529,227 ,358	77	406,395 ,471	0	0	0	23,121, 260	0.00	23,121,260	0.00	5.6 9
			Indeks Kinerja PSMB	Indeks	3		3					0.00	0	0.00	#D IV/ 0!	
		Sub Keg .	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Sertifikat	160	114,595 ,100	366	102,411 ,050	61	0	57	2,800,0 00	118. 00	2,800,000	32.2 4	2.7 3

	Sub Keg .	Pengemban gan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Doku men	200	209,300 ,558	478	183,942 ,621	94	0	25	18,821, 260	119. 00	18,821,260	24.9 0	10. 23
	Sub Keg .	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Kom oditi	2	77,839, 450	2	76,577, 100	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Pengemban gan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertif ikat	2	127,492 ,250	2	43,464, 700	0	0	0	1,500,0 00	0.00	1,500,000	0.00	3.4 5
Jumlah II (UPT. PSMB)						7,723,0 85,163		7,492,2 58,808		70,770, 000		202,48 9,999	0.00	273,259,99 9	#DI V/0!	3.6 5

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kineja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan ke -				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025 (%)	
									I		II					
1	2	4	5		8		8		9		10		11 = 9 + 10		12=11/8* 100%	
			Indikator	Satu an	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

Mewujudkan tata kelola keperintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	Pro	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	68	982,971,623	68	842,953,925		119,160,000		201,284,368	0.00	320,444,368	0.00	38.01
		Keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	504,900,000	90	504,900,000	8.06	119,160,000	8.06	87,985,000	16.11	207,145,000	17.90	41.03
		Sub Keg	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	504,900,000	1	504,900,000	0	119,160,000	0	87,985,000	0.00	207,145,000	0.00	41.03

	Keg .	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Keg .	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaa n dan kepegawaian	lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

	Keg .	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian	Doku men	1	64,486, 765	1	33,181, 567	0	0	0	11,192, 450	0.00	11,192,450	0.00	33. 73
	Sub Keg .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1,582,9 65	2	738,717	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	33,848, 800	2	21,125, 550	0	0	1	6,391,2 00	1.00	6,391,200	50.0 0	30. 25
	Sub Keg .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5,900,0 00	1	2,477,3 00	0	0		1,856,2 50	0.00	1,856,250	0.00	74. 93
	Sub Keg .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	1	12,805, 000	1	8,840,0 00	0	0	0	2,945,0 00	0.00	2,945,000	0.00	33. 31

Sub Keg .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	10,350,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Keg .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	1	86,125,000	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	86,125,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Sub Keg .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
Sub Keg .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
Sub Keg .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
Keg .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	lapo ran	1	184,411 ,858	1	184,411 ,858	0	0	0	65,278, 250	0.00	65,278,250	0.00	35. 40
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Lapo ran	2	149,411 ,858	2	149,411 ,858	0	0	0	65,278, 250	0.00	65,278,250	0.00	43. 69

		Listrik yang Disediakan													
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	1	35,000, 000	1	35,000, 000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Keg .	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	lapo ran	1	143,048 ,000	1	120,460 ,500	0	0	0	36,828, 668	0.00	36,828,668	0.00	30. 57
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	8	81,048, 000	8	75,040, 500	0	0	0	36,828, 668	0.00	36,828,668	0.00	49. 08

	Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya													
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	62,000,000	40	45,420,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DIV/0!	0.00

		Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DI V/0!	0.0 0	
		Pro g.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Layanan IKM	%	100	1,023,301,752	100	636,159,746	0	0	0	13,432,240	0.00	13,432,240	0.00	2.11
		Keg .	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	IKM	1,069	1,023,301,752	1,069	636,159,746	0	0	0	13,432,240	0.00	13,432,240	0.00	2.11
		Sub Keg .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	1,023,301,752	2	636,159,746	0	0	0	13,432,240	0.00	13,432,240	0.00	2.11

Jumlah III (UPT. P2IPK)				2,006,273,375	1,479,113,671	119,160,000	214,716,608	0.00	333,876,608	#DI V/0!	22.57
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	------	-------------	----------	-------

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan ke -				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Provinsi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2025 (%)		
				K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5		8		8		9		10		11 = 9 + 10		12=11/8* 100%	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Goo	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	Pro g. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	68	392,483,200	68	355,933,400		57,990,000		62,464,209	0.00	120,454,209	0.00	33.84

d Gove rnance and Clean Gove rnment)																
	Keg .	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	231,960 ,000	90	231,960 ,000	4.1 8	57,990, 000	4.1 8	28,900, 000	8.37	86,890,000	9.30	37. 46
	Sub Keg .	Penyediaan Adminstras i Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	231,960 ,000	1	231,960 ,000	0	57,990, 000	0	28,900, 000	0.00	86,890,000	0.00	37. 46
	Keg .	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0	

Sub Keg .	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Keg .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Keg .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	57,364,500	1	26,764,700	0	0	0	627,500	0.00	627,500	0.00	2.34
Sub Keg .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Sub Keg .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19,194, 350	1	7,693,5 00	0	0	0	627,50 0	0.00	627,500	0.00	8.1 6
Sub Keg .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4,010,1 50	1	2,011,2 00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapo ran	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	1	34,160, 000	1	17,060, 000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Keg .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lapor an	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0

Keg .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	48,606,800	1	48,606,800	0	0	0	11,846,709	0.00	11,846,709	0.00	24.37
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	47,256,800	1	47,256,800	0	0	0	11,483,209	0.00	11,483,209	0.00	24.30
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,350,000	1	1,350,000	0	0	0	363,500	0.00	363,500	0.00	26.93

	Keg .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	54,551,900	1	48,601,900	0	0	0	21,090,000	0.00	21,090,000	0.00	43.39
	Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	30,856,900	1	26,856,900	0	0	0	16,500,000	0.00	16,500,000	0.00	61.44
	Sub Keg .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	Sub Keg .	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

	Sub Keg .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	8,690,0 00	5	6,740,0 00	0	0	0	4,590,0 00	0.00	4,590,000	0.00	68. 10
	Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Sub Keg .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	15,005, 000	1	15,005, 000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
	Pro g.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	1,235,4 14,000	100	1,030,2 69,700	25	0	25	805,17 0,000	50.0 0	805,170,00 0	50.0 0	78. 15
	Keg .	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	laporan	1	1,013,6 26,150	1	915,669 ,550	0	0	0	800,00 0,000	0.00	800,000,00 0	0.00	87. 37

Sub Keg .	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPS K	4	932,755 ,750	4	873,436 ,050	0	0	4	800,00 0,000	4.00	800,000,00 0	100. 00	91. 59
Sub Keg .	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPK SM	1	44,004, 400	1	23,863, 500	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.0 0
Sub Keg .	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Peng aduan	44	36,866, 000	44	18,370, 000	0	0	10	0	10.0 0	0	22.7 3	0.0 0
Keg .	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	lapo ran	1	221,787 ,850	1	114,600 ,150	0	0	0	5,170,0 00	0.00	5,170,000	0.00	4.5 1

	Sub Keg .	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Beredar dan Barang Jasa serta Beredar Kegiatan dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	2	142,873,250	2	75,385,150	0	0	0	5,170,000	0.00	5,170,000	0.00	6.86
	Sub Keg .	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	8	78,914,600	8	39,215,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
Jumlah IV(UPT. P2K)						1,627,897,200		1,386,203,100		57,990,000		867,634,209	0.00	925,624,209	#DI V/0!	66.77
Jumlah I+II+III+IV						40,754,382,533.00		36,970,001,700.00		3,562,900,743.00		5,907,089,995.00	0.00	9,469,990,738	#DI V/0!	25.62
Rata-rata capaian Kinerja (%)																

Predikat Kinerja								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapatkan jabarkan bahwa di triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 5.907.089.995., ada beberapa kegiatan yang telah mencapai target kinerja dan ada pula yang belum mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2..2.1. Bidang Industri

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Memaksimalkan pembangunan sentra IKM khususnya di Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan: fasilitas pembentukan pengurus, meningkatkan kemampuan kegiatan usaha, mendirikan unit pelayanan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi TPL dan konsultan bagi SIKIM di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2018-2038 dan memaksimalkan pembentukan peraturan daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) diseluruh kabupaten/kota Sulawesi Tengah khususnya untuk Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Morowali dan Buol;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi sertifikat halal produk pangan, fasilitasi pendampingan dan sertifikasi GMP bagi IKM pangan, fasilitasi pengujian nutrisi produk IKM pangan sosialisasi legalitas usaha pada 13 (tiga belas) kabupaten/kota Sulawesi Tengah;
4. Perlu dilakukan pendataan yang valid dan menyeluruh terutama tentang jumlah IKM di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan melakukan pemetaan IKM-IKM unggulan daerah.
5. Perlu pendataan perusahaan dan IKM besar yang mampu dan layak agar mampu di masukan kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

6. Izin makanan dalam negeri rumah cokelat belum dapat di terbitkan karena gedung sebagai tempat produksi harus di renovasi dan kedepannya makanan dalam negeri tersebut dapat segera diterbitkan.
7. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM aparatur pembina teknis/tenaga teknis teknis/operator mesin produksi baik rumah cokelat, rumah tenun maupun rumah kemasan yang ada di provinsi/kabupaten/kota.

2.2..2 Bidang Perdagangan

1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan oleh tingkat inflasi yang terkendali, terutama inflasi kelompok bahan makanan melalui pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok;
2. Revitalisasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dengan menjadikan pedagang di pasar-pasar barometer baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dapat di jadikan sebagai big data dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat harus mengacu pada pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang telah di tetapkan oleh menteri perdagangan setiap tahun:
 - a) Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih proaktif dalam proses pengajuan hibah.
 - b) Terkait pembangunan pasar yang terjadi permasalahan pada Kabupaten Toli-Toli atas keterlambatan pembangunan pasar agar dapat mengikuti anjuran KPPN dan tidak untuk melaksanakan pembangunan pasar tersebut dengan menggunakan biaya sendiri.
4. perlu dilakukan sinergi kebijakan terkait implementasi sistem resi gudang antara pemerintah pusat dan daerah terutama dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan sistem resi gudang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gudang dan sarana prasarana penunjang, terutama pengelola gudang, akses pemasaran terhadap produk resi gudang serta ketersediaan lembaga pembiayaan. Selain itu,
5. Melakukan koordinasi pengawasan provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah.
6. Dalam rangka memaksimalkan pembentukan unit kemetrolagian legal provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong untuk menjadi fasilitator dalam penyusunan kerja sama.

7. Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih pro aktif dalam proses pengajuan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen salah satunya dengan melakukan “Program Pelatihan Tektik Pengelolaan Pasar”.
8. Pemerintah provinsi diharapkan turut memantau pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan bantuan tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
9. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengembangan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing, yang dilakukan melalui strategi menentukan produk unggulan yang berorientasi ekspor berdasarkan sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Meningkatkan mutu produk ekspor dapat dicapai melalui peningkatan kelembagaan mutu di provinsi dan peningkatan pengawasan mutu.
11. Peningkatan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri meliputi:
 - a. Pangsa pasar produk Sulawesi Tengah di pasar domestik
 - b. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama
 - c. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospekti

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Dari hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD yang didasarkan pada data dalam Renstra 2021–2026 dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan KUA-PPAS, terdapat perbedaan pada besaran pendanaannya tetapi pada Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan tetap sama.

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI
		SEBELUM	SESUDAH	2025 RKPD	2025 APBD	RKPD PERUBAHAN 2025		
3	4	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				25,262,964,241.00	33,276,403,793.00	30,925,830,568.52	5,662,866,327.52	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi SIUP B2, /MB-Gol.B /MB Gol. C	100 %	100 %	369,309,350.00	315,057,500.00	156,519,250.00	320,775,750.00	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	<i>Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	<i>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	72,809,000.00	78,766,650.00	41,137,250.00	-31,671,750.00	
Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	72,809,000.00	78,766,650.00	41,137,250.00	-31,671,750.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya								
	<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya								

	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	296,500,350.00	236,290,850.00	115,382,000.00	-181,118,350.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA								
	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	296,500,350.00	236,290,850.00	115,382,000.00	-181,118,350.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100 %	100 %	227,461,700.00	191,038,800.00	96,664,400.00	-9,971,700.00	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Jumlah Dokumen fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	227,461,700.00	191,038,800.00	96,664,400.00	-130,797,300.00	
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi								
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	121,503,900.00	76,548,850.00	41,102,900.00	-80,401,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas								
	<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>	2 Orang	2 Orang	55,957,800.00	71,933,000.00	35,779,000.00	-20,178,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi								

	<i>Jumlah kegiatan fasilitas dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000.00	42,556,950.00	19,782,500.00	-30,217,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100 %	100 %	1,708,538,750.00	1,570,790,550.00	1,350,978,700.00	889,201,250.00	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	129,265,800.00	110,756,950.00	56,075,200.00	-73,190,600.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor								
	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	4 Laporan	4 Laporan	79,266,100.00	69,101,250.00	35,756,750.00	-43,509,350.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor								
	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	4 laporan	4 laporan	49,999,700.00	41,655,700.00	20,318,450.00	-29,681,250.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1,479,523,150.00	1,395,862,850.00	1,259,871,000.00	-219,652,150.00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota								

	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	4 Laporan	261,768,650.00	171,032,900.00	150,845,650.00	-110,923,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	6 Laporan	6 Laporan	1,217,754,500.00	1,224,829,950.00	1,109,025,350.00	-108,729,150.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	<i>Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi</i>	100 %	100 %	99,749,800.00	64,170,750.00	35,032,500.00	-64,717,300.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida								
	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i>	1 Laporan	1 Laporan	99,749,800.00	64,170,750.00	35,032,500.00	-64,717,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor Pertumbuhan nilai ekspor non migas	26478,59 6 Juta USD %	26478,59 6 Juta USD %	737,239,900.00	671,189,600.00	530,024,550.00	595,920,100.00	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	<i>Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam</i>	1 Laporan	1 Laporan	737,239,900.00	671,189,600.00	530,024,550.00	-207,215,350.00	

Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Provinsi							
Pameran Dagang Internasional/Nasional								
	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	391,337,000.00	217,456,000.00	186,341,000.00	-204,996,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pameran Dagang Lokal								
	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	130,987,400.00	276,548,550.00	250,223,400.00	119,236,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Citra Produk Ekspor								
	<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	2 Produk	2 Produk	214,915,500.00	177,185,050.00	93,460,150.00	-121,455,350.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	20 %	20 %	301,513,550.00	255,899,000.00	124,833,300.00	-84,343,950.00	
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</i>	1 Laporan	1 Laporan	49,999,800.00	107,037,250.00	52,267,600.00	2,267,800.00	
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi								
	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam</i>	3 UMKM	3 UMKM	49,999,800.00	107,037,250.00	52,267,600.00	2,267,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	<i>negeri</i>							
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1 Laporan	1 Laporan	203,041,750.00	108,299,750.00	53,130,900.00	-149,910,850.00	
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi								
	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	25 UMKM	25 UMKM	203,041,750.00	108,299,750.00	53,130,900.00	-149,910,850.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1 Laporan	1 Laporan	48,472,000.00	40,562,000.00	19,434,800.00	-29,037,200.00	
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1 Laporan	1 Laporan	48,472,000.00	40,562,000.00	19,434,800.00	-29,037,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	68 Nilai Indeks	68 Nilai Indeks	19,973,255,452.00	28,507,786,985.00	27,196,878,997.52	66,686,303.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Disperindag</i>	71 Nilai Indeks	71 Nilai Indeks	802,530,350.00	780,179,900.00	444,200,800.00	-358,329,550.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	672,484,150.00	604,933,550.00	340,694,950.00	-331,789,200.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	12,825,000.00	10,824,750.00	10,824,750.00	-2,000,250.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	6,050,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5,725,100.00	6,150,000.00	7,709,950.00	1,984,850.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,200.00	5,976,550.00	5,976,550.00	2,226,350.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	101,695,900.00	146,245,050.00	72,944,600.00	-28,751,300.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90 %	90 %	15,543,930,400.00	17,770,340,447.00	17,698,738,080.52	2,154,807,680.52	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	95 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	12,614,592,400.00	15,134,383,497.00	15,135,256,780.52	2,520,664,380.52	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1,104,600,000.00	972,600,000.00	1,014,000,000.00	-90,600,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	500 Dokumen	500 Dokumen	411,217,850.00	371,490,000.00	335,534,050.00	-75,683,800.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	160,825,200.00	139,715,950.00	118,787,850.00	-42,037,350.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	15 Laporan	15 Laporan	49,787,950.00	46,700,000.00	46,226,400.00	-3,561,550.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	98,649,000.00	41,747,000.00	15,961,000.00	-82,688,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

	<i>Pemeriksaan</i>							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	14 Laporan	14 Laporan	59,528,500.00	26,014,000.00	12,182,000.00	-47,346,500.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	55,929,500.00	16,400,000.00	15,700,000.00	-40,229,500.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	14 Laporan	14 Laporan	255,093,700.00	176,472,000.00	134,416,000.00	-120,677,700.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	10 Dokumen	10 Dokumen	90,340,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-20,340,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	68,316,000.00	48,700,000.00	24,405,000.00	-43,911,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	2 Laporan	32,599,700.00	30,100,000.00	15,050,000.00	-17,549,700.00	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	63,838,000.00	27,672,000.00	24,961,000.00	-38,877,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (costumer/stokeholder)</i>	84 Nilai Indeks	84 Nilai Indeks	193,296,100.00	170,271,100.00	126,959,300.00	-66,336,800.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	0 Paket	50,025,000.00	0.00	0.00	-50,025,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	58,431,100.00	7,700,000.00	5,350,000.00	-53,081,100.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	13 Orang	13 Orang	78,240,000.00	105,240,000.00	94,160,000.00	15,920,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	60 Orang	60 Orang	6,600,000.00	57,331,100.00	27,449,300.00	20,849,300.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	709,423,276.00	688,986,836.00	342,950,415.00	-366,472,861.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	10,060,830.00	10,060,830.00	5,029,800.00	-5,031,030.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	112,512,210.00	123,492,210.00	51,933,660.00	-60,578,550.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	39,381,400.00	39,381,400.00	19,817,575.00	-19,563,825.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	190,581,250.00	187,674,850.00	90,700,000.00	-99,881,250.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	509,057,800.00	6,992,489,176.00	6,563,243,876.00	6,054,186,076.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	2 Unit	344,960,000.00	367,180,000.00	0.00	-344,960,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Mebel								
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	2 Paket	27,990,000.00	39,699,600.00	0.00	-27,990,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	8 Unit	136,107,800.00	99,542,700.00	5,160,000.00	-130,947,800.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	986,117,626.00	1,000,985,126.00	1,027,462,326.00	41,344,700.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	351,895,200.00	381,895,200.00	390,055,200.00	38,160,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	165,261,620.00	151,661,620.00	149,161,620.00	-16,100,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	973,806,200.00	928,062,400.00	858,908,200.00	-114,898,000.00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	46 Unit	46 Unit	365,934,300.00	428,182,500.00	370,846,600.00	4,912,300.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Mebel								
	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	146 Unit	150 Unit	205,200,000.00	139,830,000.00	120,740,000.00	-84,460,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	11 Unit	73,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	-23,000,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3,181,627,998.00	7,477,978,740.00	6,303,006,431.00	3,121,378,433.00	

PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	100 138000 20 27 41,45 % Orang USD Miliar % %	100 138000 20 27 41,45 % Orang USD Miliar % %	2,638,579,698.00	7,109,772,852.00	6,124,837,446.00	947,299,902.00	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2,638,579,698.00	7,109,772,852.00	6,124,837,446.00	3,486,257,748.00	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	317,289,200.00	284,134,450.00	187,475,450.00	-129,813,750.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	63,725,250.00	44,524,050.00	21,262,200.00	-42,463,050.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	373,999,850.00	632,281,300.00	374,213,100.00	213,250.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	253,981,000.00	159,508,700.00	97,649,550.00	-156,331,450.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	396,105,550.00	4,781,967,550.00	4,718,608,400.00	4,322,502,850.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	219,999,900.00	184,055,050.00	89,469,000.00	-130,530,900.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	100 65,17 % Rp. Triliun	100 65,17 % Rp. Triliun	355,999,800.00	277,999,750.00	133,911,250.00	162,040,200.00	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	355,999,800.00	277,999,750.00	133,911,250.00	-222,088,550.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi								
	<i>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	145,542,800.00	107,910,600.00	52,973,000.00	-92,569,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

1 Dokumen

1 Dokumen

210,457,000.00

170,089,150.00

80,938,250.00

-129,518,750.00

Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	65,17 66 Rp. Triliun %	65,17 66 Rp. Triliun %	187,048,500.00	90,206,138.00	44,257,735.00	385,721,500.00	
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	187,048,500.00	90,206,138.00	44,257,735.00	-142,790,765.00	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	54,008,650.00	29,143,300.00	13,732,950.00	-40,275,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	87,723,300.00	28,927,838.00	14,467,135.00	-73,256,165.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	45,316,550.00	32,135,000.00	16,057,650.00	-29,258,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				25,262,964,241.00	33,276,403,793.00	30,925,830,568.52	5,662,866,327.52	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3 %	3 %	1,945,645,539.00	1,764,641,358.00	1,469,931,371.00	924,794,061.00	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kinerja PSMB</i>	4 Nilai Indeks 77 Nilai Indeks	4 Nilai Indeks 77 Nilai Indeks	650,225,639.00	529,227,358.00	439,661,671.00	-210,563,968.00	
Pengembangan Layanan Kalibrasi								
	<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	160 Sertifikat	160 Sertifikat	127,487,250.00	127,492,250.00	102,411,050.00	-25,076,200.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengembangan Layanan Pengujian								
	<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	1 laporan	1 laporan	300,566,064.00	209,300,558.00	217,208,821.00	-83,357,243.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemantauan Mutu Produk								
	<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	4 Produk	4 Produk	135,165,825.00	114,595,100.00	76,577,100.00	-58,588,725.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi								
	<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	2 Sertifikat	2 Sertifikat	87,006,500.00	77,839,450.00	43,464,700.00	-43,541,800.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	68 Nilai Indeks	68 Nilai Indeks	19,973,255,452.00	28,507,786,985.00	27,196,878,997.52	66,686,303.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90 %	90 %	15,543,930,400.00	17,770,340,447.00	17,698,738,080.52	2,154,807,680.52	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	258,480,000.00	284,430,000.00	284,430,000.00	25,950,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	255,093,700.00	176,472,000.00	134,416,000.00	-120,677,700.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian</i>	0 Laporan	0 Laporan	193,296,100.00	170,271,100.00	126,959,300.00	-66,336,800.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</i>	1 Laporan	1 Laporan	709,423,276.00	688,986,836.00	342,950,415.00	-366,472,861.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	3,237,246.00	3,237,246.00	1,615,173.00	-1,622,073.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	51,147,860.00	49,011,735.00	19,830,590.00	-31,317,270.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	25,614,150.00	31,310,300.00	16,086,350.00	-9,527,800.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Fasilitas Kunjungan Tamu								
	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	90,903,000.00	89,367,000.00	44,391,000.00	-46,512,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	509,057,800.00	6,992,489,176.00	6,563,243,876.00	6,054,186,076.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Mebel								
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	0.00	0.00	48,247,000.00	48,247,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	25 Unit	0.00	6,399,941,876.00	6,503,836,876.00	6,503,836,876.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	986,117,626.00	1,000,985,126.00	1,027,462,326.00	41,344,700.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	15,498,000.00	15,498,000.00	12,688,000.00	-2,810,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	168,737,496.00	168,737,496.00	191,083,196.00	22,345,700.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	51,224,152.00	49,874,152.00	60,955,652.00	9,731,500.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	973,806,200.00	928,062,400.00	858,908,200.00	-114,898,000.00	

Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	50,600,000.00	48,600,000.00	40,040,000.00	-10,560,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Mebel								
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	64 Unit	49,800,000.00	49,800,000.00	41,760,000.00	-8,040,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0.00	0.00	42,409,200.00	42,409,200.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
				25,262,964,241.00	33,276,403,793.00	30,925,830,568.52	5,662,866,327.52	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	68 Nilai Indeks	68 Nilai Indeks	19,973,255,452.00	28,507,786,985.00	27,196,878,997.52	66,686,303.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	90 %	90 %	15,543,930,400.00	17,770,340,447.00	17,698,738,080.52	2,154,807,680.52	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	498,360,000.00	504,900,000.00	488,700,000.00	-9,660,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	255,093,700.00	176,472,000.00	134,416,000.00	-120,677,700.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian</i>	0 Laporan	0 Laporan	193,296,100.00	170,271,100.00	126,959,300.00	-66,336,800.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</i>	1 Laporan	1 Laporan	709,423,276.00	688,986,836.00	342,950,415.00	-366,472,861.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	3,165,930.00	1,582,965.00	738,717.00	-2,427,213.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	28,917,800.00	33,848,800.00	21,125,550.00	-7,792,250.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	8,350,000.00	5,900,000.00	2,477,300.00	-5,872,700.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1 Laporan	12,805,000.00	12,805,000.00	8,840,000.00	-3,965,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	22,072,000.00	10,350,000.00	0.00	-22,072,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	509,057,800.00	6,992,489,176.00	6,563,243,876.00	6,054,186,076.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Mebel								
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Paket	1 Paket	0.00	86,125,000.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

	<i>Disediakan</i>							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	986,117,626.00	1,000,985,126.00	1,027,462,326.00	41,344,700.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	2 Laporan	161,944,358.00	149,411,858.00	139,611,858.00	-22,332,500.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	22,650,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	12,350,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	973,806,200.00	928,062,400.00	858,908,200.00	-114,898,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan</i>	6 Unit	6 Unit	82,520,000.00	81,048,000.00	75,040,500.00	-7,479,500.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

	<i>Dibayarkan Pajaknya</i>							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Mebel								
	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	42 Unit	46 Unit	94,500,000.00	62,000,000.00	45,420,000.00	-49,080,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3,181,627,998.00	7,477,978,740.00	6,303,006,431.00	3,121,378,433.00	
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Persentase Layanan IKM	100 %	100 %	2,638,579,698.00	7,109,772,852.00	6,124,837,446.00	947,299,902.00	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah layanan bagi Pelaku IKM</i>	1069 Layanan IKM	1069 Layanan IKM	2,638,579,698.00	7,109,772,852.00	6,124,837,446.00	3,486,257,748.00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								

	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1,013,478,948.00	1,023,301,752.00	636,159,746.00	-377,319,202.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	8,784,244,760.52	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				25,262,964,241.00	33,276,403,793.00	30,925,830,568.52	5,662,866,327.52	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	100 %	1,945,645,539.00	1,764,641,358.00	1,469,931,371.00	924,794,061.00	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen</i>	1 Laporan	1 Laporan	1,046,614,500.00	1,013,626,150.00	915,669,550.00	-130,944,950.00	
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen								
	<i>Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>	4 BPSK	4 BPSK	875,599,800.00	932,755,750.00	873,436,050.00	-2,163,750.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen								
	<i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>	1 LPKSM	1 LPKSM	45,304,700.00	44,004,400.00	23,863,500.00	-21,441,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen								
	<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	44 Pengaduan	44 Pengaduan	125,710,000.00	36,866,000.00	18,370,000.00	-107,340,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan</i>	1 Laporan	1 Laporan	248,805,400.00	221,787,850.00	114,600,150.00	-134,205,250.00	

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga								
	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	2 Laporan	2 Laporan	169,890,600.00	142,873,250.00	75,385,150.00	-94,505,450.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga								
	<i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i>	8 Kasus	8 Kasus	78,914,800.00	78,914,600.00	39,215,000.00	-39,699,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	68 Nilai Indeks	68 Nilai Indeks	19,973,255,452.00	28,507,786,985.00	27,196,878,997.52	66,686,303.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	90 %	90 %	15,543,930,400.00	17,770,340,447.00	17,698,738,080.52	2,154,807,680.52	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	231,960,000.00	231,960,000.00	231,960,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	255,093,700.00	176,472,000.00	134,416,000.00	-120,677,700.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian</i>	0 Laporan	0 Laporan	193,296,100.00	170,271,100.00	126,959,300.00	-66,336,800.00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</i>	1 Laporan	1 Laporan	709,423,276.00	688,986,836.00	342,950,415.00	-366,472,861.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	21,953,250.00	19,194,350.00	7,693,500.00	-14,259,750.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	8,021,350.00	4,010,150.00	2,011,200.00	-6,010,150.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	47,100,000.00	34,160,000.00	17,060,000.00	-30,040,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Laporan	0 Laporan	509,057,800.00	6,992,489,176.00	6,563,243,876.00	6,054,186,076.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Mebel								
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					
		SEBELUM	SESUDAH	2025 RKPD	2025 APBD	RKPD PERUBAHAN 2025			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	986,117,626.00	1,000,985,126.00	1,027,462,326.00	41,344,700.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	47,256,800.00	47,256,800.00	47,256,800.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	973,806,200.00	928,062,400.00	858,908,200.00	-114,898,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit	4 Unit	20,856,900.00	30,856,900.00	26,856,900.00	6,000,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

	<i>Perizinannya</i>							
Pemeliharaan Mebel								
	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	18 Unit	13 Unit	12,340,000.00	8,690,000.00	6,740,000.00	-5,600,000.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
3	4	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	15,005,000.00	15,005,000.00	15,005,000.00	0.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
				28,444,592,239.00	40,754,382,533.00	37,228,836,999.52	999,862,330,539.29	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni. Pengembangan industri industrial vegetable oil / industrial lauric oil (IVO/ILO), dimana IVO/ILO merupakan hasil pemrosesan CPO yang menurunkan kadar getah dan metal.
2. Kegiatan prioritas dalam rangka penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) dan mengembangkan produk IKM.
3. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melakukan pendampingan pada pabrikan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah ajang temu bisnis Internasional.
4. Kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0. Kemenperin berencana mengembangkan data industri 4.0 dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0.
5. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. Hal tersebut akan dilakukan melalui pelatihan industri berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi dan kejuruan industri berbasis kompetensi menuju dual system.
6. Program Pelaksanaan Anti Korupsi.

3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D.
2. Membangun pusat jajanan dan souvenir.
3. Menjalankan Program perlindungan konsumen.
4. Program optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang.
5. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting.

6. Pelaksanaan EXPO
7. Melaksanakan program misi dagang, pameran, dan promosi luar negeri.
8. Program untuk perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
9. Program pemberian fasilitas perizinan dan fasilitas ekspor impor.
10. Program pengembangan sarana dan prasarana Kemendag.
11. Program pengembangan sumber daya manusia Kemendag.
12. Program pelaksanaan anti Korupsi.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
 2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.
- Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan umum dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%

		2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			2 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	1 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			2 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

			perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	1 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			2 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	1 Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	1 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			2 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data	1 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

		perusahaan industri	2	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri
--	--	---------------------	---	---

3.3 Program dan Kegiatan

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 program dengan pagu anggaran tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pagu anggaran perubahan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Program	Pembiayaan (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,686,559,236	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5,488,677,700	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,350,978,700	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	96,664,400	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	124,833,300	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,030,269,700	
7	Pogram Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	156,519,250	
8	Program Pengembangan Ekspor	530,024,550	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	133,911,250	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	44,257,735	
	Jumlah Dinas	28,685,251,038	

Pada Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 32,119,116,666 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-5	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				23,375,047,460				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21,206,898,410				
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	17,862,835,160	APBD		68	17,537,104,555
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Disperindag	Sulawesi Tengah	71	802,530,350	APBD		73	764,662,900
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	14,555,130,400	APBD		90	14,683,760,955
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Tengah	14	255,093,700	APBD		14	272,208,900
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder)	Sulawesi Tengah	84	193,296,100	APBD		85	141,007,900

	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Sulawesi Tengah	1	386,135,690	APBD		1	427,783,000
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	509,057,800	APBD		1	136,107,800
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	517,456,820	APBD		1	644,387,400
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	644,134,300	APBD		1	467,185,700
	Prog PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	- Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	Sulawesi Tengah	100	369,309,350	APBD		100	690,085,100
		- Persentase penerbitan SKA (%)	Sulawesi Tengah	100				100	0
	Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi	- Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Sulawesi Tengah	0		APBD		0	0

	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor								
Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	72,809,000	APBD		1	109,799,900
Keg.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	- Jumlah dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Sulawesi Tengah	0	0	APBD		0	0
Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	- Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	296,500,350	APBD		0	580,285,200

	Prog.	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	100	227,461,700	APBD		100	217,490,000
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	227,461,700	APBD		1	217,490,000
	Prog.	STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	- Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok (%)	Sulawesi Tengah	100	1,708,538,750			100	2,597,740,000
	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	129,265,800	APBD		1	407,448,000
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,479,523,150	APBD		1	2,054,476,000

	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (%)	Sulawesi Tengah	100	99,749,800	APBD	100	135,816,000
	Prog.	PENGEMBANGAN EKSPOR	- Nilai ekspor (USD) Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Sulawesi Tengah	26478,59 Juta USD 6%	737,239,900	APBD		1,333,160,000
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	- Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	737,239,900	APBD		1,333,160,000
	Prog.	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	- Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	20%	301,513,550	APBD	20%	217,169,600
	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	49,999,800	APBD	1	0

	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	203,041,750	APBD		1	92,218,800
	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,472,000	APBD		1	124,950,800
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,168,149,050	APBD			2,384,963,955
	Prog. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<p>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p> <p>- Jumlah Tenaga kerja sektor Industri Pengolahan Nonmigas Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Nonmigas Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB</p>	Sulawesi Tengah	100% 138000 Orang 20 USD Miliar 27% 41,45%	1,625,100,750	APBD		100%	2,800,000,000

	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,625,100,750	APBD		1	2,800,000,000
	Prog.	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis (%)	Sulawesi Tengah	100%	355,999,800	APBD			518,040,000
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	355,999,800	APBD		1	518,040,000
	Prog.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	Sulawesi Tengah	65,17 Triliun 66%	187,048,500	APBD			572,770,000
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	187,048,500	APBD		1	572,770,000
	UPT. PSMB					1,419,517,543				1,561,469,297

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1,419,517,543			1,561,469,297	
Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	769,291,904	APBD	68	846,221,094
Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	258,480,000	APBD	90	331,320,000
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	170,902,256	APBD	1	195,225,900
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	0	0	APBD	1	0
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	235,459,648	APBD	1	306,943,500
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	104,450,000	APBD	1	107,131,200
Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi (%)	Sulawesi Tengah	3	650,225,639	APBD	3	1,035,219,800
Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Sulawesi Tengah	77	650,225,639	APBD	77	1,035,219,800

		- Indeks Kinerja PSMB (Indeks)	Sulawesi Tengah	4				4	0
	UPT. P2IPK				1,948,764,036				2,143,640,440
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				935,285,088				1,028,813,597
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	935,285,088	APBD		68	1,028,813,597
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	498,360,000	APBD		90	575,520,000
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Tengah	0	0	APBD		0	0
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian	Sulawesi Tengah	0	0	APBD		0	0
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	75,310,730	APBD		1	98,753,800
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	0	0	APBD		0	0
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	184,594,358	APBD		1	248,574,500

	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	177,020,000	APBD		1	117,040,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,013,478,948				1,114,826,843
	Prog. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase Layanan IKM	Sulawesi Tengah	100	1,013,478,948	APBD		100	785,879,600
	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,013,478,948	APBD		1	785,879,600
	UPT P2K	-			1,701,263,200				1,871,389,520
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,701,263,200				1,871,389,520
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	405,843,300	APBD		68	446,427,630
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	231,960,000	APBD		90	251,160,000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	77,074,600	APBD		1	137,922,600

	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,606,800	APBD		1	60,351,800
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,201,900	APBD		1	72,893,900
	Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Sulawesi Tengah	100	1,295,419,900	APBD		100	1,835,219,800
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	1,046,614,500	APBD		1	1,317,609,800
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	248,805,400	APBD		1	517,610,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2025

4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan tahun 2025 melalui inisiatif dari Kabupaten/Kota, umumnya merupakan usulan para pemangku kepentingan dan wakil masyarakat dan instansi terkait lainnya yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing usaha dan peningkatan IKM serta perlindungan konsumen bagi masyarakat. Adapun usulan program/kegiatan kabupaten/kota Tahun 2025 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program/Kegiatan
Kabupaten / Kota Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Volume	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Tojo Una-Una				
1	Keg. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pasar Murah	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	
		Terlaksananya Operasi Pasar	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Barang Beredar	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

5.2 Rencana tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang di lakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka di perlukan adanya kerja keras yang terarah, trkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan aga berdaya guna dan berhasil guna.

Palu,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006